

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 37.168.300 jiwa, pada tahun 2009 mencapai 34.963.300 jiwa dan pada tahun 2011 30.018.930 jiwa. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia semakin berkurang. Program yang dijalankan pemerintah dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PNPM menyediakan dana langsung dari pusat yaitu melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau staf Unit Pengelola Kegiatan TPK di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam membangun

manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang / dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Pelaksanaan pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

Pengelolaan dana PNPM pada setiap kecamatan dilakukan suatu badan yang disebut PNPM UPK. PNPM UPK merupakan suatu badan yang kepengurusannya dibentuk oleh Musyawarah Antar Desa (MAD). Dana pengembangan dialokasikan pada pengembangan pendidikan, keterampilan masyarakat, penyaluran dana untuk UMKM, dan sebagainya. PNPM UPK memiliki berbagai macam program yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program kerja yang dilaksanakan PNPM UPK merupakan hasil dari keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) pada masing-masing kecamatan. Program kerja yang dilaksanakan PNPM UPK diantaranya : 1. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), 2. Pelatihan terhadap ibu-ibu , 3. Pelatihan terhadap pengusaha kecil, 4. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) .

PNPM UPK merupakan suatu kesatuan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya dan kedudukannya terpisah dari pemerintah

atau pihak lain yang memiliki kepentingan didalamnya, jadi hubungan antara PNPM UPK dengan pemerintah atau pihak yang memiliki kepentingan didalamnya hanyalah hubungan bisnis . Berdiri sendiri dalam hal ini berarti manajemen PNPM UPK wajib memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya kepada pemerintah atau pihak – pihak yang memiliki kepentingan.

Laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawaban manajemen kepada pemerintah dan pihak – pihak yang memiliki kepentingan didalamnya atas aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan harus ditunjukkan oleh manajemen sebagai wujud pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

Informasi – informasi yang dapat diberikan kepada pihak eksternal oleh manajemen melalui laporan keuangan yaitu informasi posisi keuangan, informasi kinerja keuangan, dan informasi arus kas. Sistem berpasangan (*double-entry system*) merupakan sistem pencatatan akuntansi termudah dan nyaman dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Besarnya pengaruh PNPM UPK terhadap perkembangan masyarakat sekitar, besarnya manfaat laporan keuangan bagi manajemen PNPM UPK dan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dilakukan manajemen PNPM UPK, maka peneliti tertarik untuk menyusun tugas akhir mengenai perancangan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Obiek tugas akhir ini adalah PNPM UPK Kasihan Rantul

Pemilihan PNPM UPK Kasihan Bantul merupakan rekomendasi dari koordinator PNPM UPK yang ada di Bantul. Sebelum melakukan perancangan sistem akuntansi, dilakukan pengumpulan data mengenai sistem akuntansi yang ada pada PNPM UPK Kasihan Bantul. Data yang diperoleh adalah :

1. Tidak adanya kode akun dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Tidak adanya buku besar dan buku pembantu.
3. Jurnal yang digunakan tidak dapat merangkum seluruh transaksi yang terjadi pada PNPM UPK Kasihan Bantul, hal ini dibuktikan dengan adanya transaksi yang tidak dicatat pada jurnal yang ada.
4. Tidak adanya standar laporan keuangan yang digunakan.
5. Pihak pengguna laporan keuangan merasa kesulitan dalam memahami laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen PNPM UPK Kasihan Bantul.
6. Laporan keuangan yang disusun manajemen PNPM UPK Kasihan Bantul tidak dapat dijadikan bahan pertanggungjawaban manajemen PNPM UPK Kasihan Bantul karena sulit dipahami dan tidak relevan dengan keadaan PNPM UPK Kasihan Bantul.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen PNPM UPK Kasihan Bantul memiliki kualitas yang kurang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan Sistem Akuntansi (SA) yang baik. Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk menyusun Tugas Akhir

yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Sistem Akuntansi *Double Entry* pada PNPM UPK Kasihan Bantul” yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dijadikan bahan pertanggungjawaban manajemen PNPM UPK Kasihan Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi Sistem Akuntansi *Double Entry* dapat menghasilkan laporan Sesuai Dengan SAK dan PTO ?
2. Apakah laporan keuangan hasil dari Sistem Akuntansi *Double Entry* dapat menjadi bahan pertanggungjawaban manajemen PNPM UPK Kasihan Bantul?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas tugas akhir ini bertujuan untuk :

1. Mengimplementasikan Sistem Akuntansi *Double Entry* dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK dan PTO.
2. Menghasilkan laporan keuangan hasil dari Sistem Akuntansi *Double Entry* dan dapat menjadi bahan pertanggungjawaban manajemen PNPM UPK Kasihan

D. Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dalam tugas akhir ini adalah :

1. Bagi pengelola keuangan UPK sistem akuntansi tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Bagi pengguna laporan keuangan, laporan yang dibuat UPK lebih mudah dipahami dan dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan.
3. Bagi peneliti aplikasi ilmu yang didapat dalam perkuliahan